

Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

OLEH:

Ressi Adiviavanti

162020100054

Ilmu Administrasi Negara

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menerangkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, profesional, dan mampu berbuat local serta bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan.

Di sisi lain para perangkat desa sering kali dikonstruksikan sebagai pamong desa yang diharapkan dapat menjadi pengayom masyarakat. Namun masih ada pengelolaan pemerintah desa dalam konteks ini yang masih lemah dalam akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Hal yang paling mencolok di

kalangan pemerintah desa adalah adanya fenomena bahwa seorang sekretaris desa (Sekdes) di isi dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Selain itu adanya batasan SMA atau sederajat bagi seorang aparat juga masih menjadi masalah yang sering diperdebatkan.

Sering dengan perubahan kelembagaan di desa maka mau tidak mau mendorong sumber daya manusia (aparat) desa untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak dicapai. Untuk itu aparat desa harus dapat bekerja secara maksimal. Sumber daya manusia tidak lagi dipandang sebagai salah satu faktor produksi sebagaimana pendapat manajemen kuno, yang memperlakukan manusia seperti halnya mesin. Tetapi sekarang ini aparat desa betul-betul sebagai *Human Capital* yang sangat berperan sesuai dengan pandangan manajemen modern. Perbedaan pandangan itu membawa indikasi pada perlakuan atas sumber daya manusia. Dalam pandangan yang pertama sumber daya manusia dikelola sejajar dengan manajemen produksi. Keuangan dan pemasaran yang tentunya tidak sesuai dengan harkat martabat manusia. Karena manusia bukan sekedar sumber melainkan pelaksanaan yang menjalankan lembaga atau motor pengarah organisasi.

Masyarakat secara umum masih sering mengeluhkan para aparatur pemerintah desa yang kurang pengertian pada kebutuhan warga. Untuk memperoleh pelayanan yang sederhana saja masyarakat sering dihadapkan pada kesulitan, misalnya prosedur yang berbelit-belit. Aparat pemerintah desa kurang merasa terpanggil untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana kedisiplinan aparatur desa dalam menjalankan tugasnya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
2. Menganalisis kedisiplinan aparatur desa dalam menjalankan tugasnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi dalam memperluas pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara khususnya bagi para mahasiswa Ilmu Administrasi Negara yang hendak melakukan penelitian sejenis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dedikasi kepada aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Jurnal 1

Kinerja Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Teras Baru Kecamatan Tajung Palas Kabupaten Bulungan, Hendra Adi Saputra (2016)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja Aparatur Desa Teras Baru ditinjau dari proses penyelenggaraan pemerintah yang mengedepankan Kesetiaan, Prestasi Kerja, Kedisiplinan, Kreativitas, Kerjasama, Kecakapan, Tanggung Jawab demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Jurnal 2

Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, Jaitun (2013)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tanggungjawab aparatur Desa Sepala Dalung tidak berhenti hingga pada saat kantor desa tutup akan tetapi aparatur desa juga mempersilahkan masyarakat yang ingin berurusan ke rumah karena aparatur menyadari jam pulang kerja lebih cepat dari jam yang telah ditentukan oleh pemerintah baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi atau pusat.

Jurnal 3

Kinerja Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Desa dan Pelayanan Masyarakat di Kampung Long Iram Seberang Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, Muhammad Nor (2014)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja Aparatur Kampung Long Iram Seberang ditinjau dari indikator kinerja dan pelayanan yang mempunyai prinsip produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Ditinjau dari sisi produktivitas, kinerja aparatur diwujudkan dengan adanya fasilitas kampung yang sudah tersedia. Sementara responsivitas dilihat dari aspirasi masyarakat yang masuk lalu mendapat tanggapan baik dari aparat kampung.

Jurnal 4

Kinerja Aparatur Desa dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Michellia Agustin (2015)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Etos kerja yang ada pada diri aparatur adalah mencari uang, menjalankan peran yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau mengerjakan tugasnya tidak berdasarkan SK yang ada, kontrol yang dilakukan pemerintah tidak

begitu efektif dalam kinerja aparatur, Sanksi yang berat tidak ada hanya sanksi yang ringan (teguran) yang berlaku dikantor.

Jurnal 5

Efektivitas Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Desa Tanggulangin, Weni Indrawati, Dr. Irawan Suntoro, M.S., Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd (2017)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja pelayanan publik sudah dapat dikatakan efektif dari beberapa indikator, namun pada indikator kejelasan dan kepastian kerja bagi aparatur desa belum sepenuhnya terpenuhi sebagai sekretaris desa. Meskipun demikian, masyarakat Desa Tanggulangin sudah merasakan pelayanan publik yang baik.

Jurnal 6

Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow), Rendra Risto Wuri, Markus Kaunang, Novie Revlie Pioh (2016)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga indikator kinerja yaitu produktivitas belum cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kualitas layanan sudah cukup baik, akuntabilitas dalam penerapan standar pelayanan dibidang administrasi kependudukan masih belum cukup baik, hal ini dilihat dari aturan dan norma serta etika pelayanan yang berkembang dalam masyarakat.

Jurnal 7

Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Upaya meningkatkan Mutu Pelayanan Publik di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun 2014, Ayok Fatnuriawan (2014)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pokok aparatur pemerintah desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa puhjarak dengan menyediakan dan memberikan pelayanan publik untuk masyarakat dengan mencangkup empat prinsip (pelayanan prima) yaitu: cepat, tepat, akurat, dan berkualitas, melengkapi fasilitas yang ada, kedisiplinan aparat dengan membuat daftar hadir, menciptakan kedekatan dan kemudahan untuk berhubungan dengan masyarakat.

Jurnal 8

Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Desa Motoling 1 Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan, Astrid Lavenia Siwu (2015)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dari hasil pembahasan tentang kinerja aparat desa dalam penyelenggaraan pelayanan SKTM di Desa Motoling 1 masih kurang

mengutamakan kualitas dan kuantitas bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Petugas aparatur desa Motoling I yang terkait dalam pengurusan SKTM sering mengalami hambatan dalam waktu penyelesaian dikarenakan sarana bahkan kelengkapan data bank dari masyarakat yang berkepentingan dalam mengurus SKTM maupun dari pihak penyedia layanan di desa motoling I.

Jurnal 9

Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Kampung Kiliarma Distrik Agimuga Kabupaten Mimika Propinsi Papua, Ofin Niwi Lingawe, Patar Rumampea, Salmin Dengo (2011)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa kinerja pemerintah Kampung Kiliarma Distrik Agimuga Kabupaten Mimika Propinsi Papua masih terkategori rendah sampai sedang dilihat dari indikator efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan kualitas layanan.

Jurnal 10

Kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam Rangka Otonomi Desa (Studi di Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan), Linda Muchacha Paramitha, Tjahjanulin Domai, Suwondo (2013)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ini bahwa kinerja pemerintah desa dalam kedisiplinan aparat Desa Gulun memang kurang disiplin. kemudian semangat kerja aparat Desa Gulun terlihat sangat baik, namun semangat yang baik tidak diimbangi dengan disiplin yang baik pula. Dalam penyelesaian tugas kinerja aparat desa cukup baik untuk prosesnya, dan juga dalam hal mengambil keputusan pemerintah desa menetapkan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) serta pemilihan kelembagaan pemerintah desa mengacu pada aturan-aturan yang telah ditaati. Kinerja pemerintah Desa Gulun dalam otonomi desa tentang prasarana kesehatan kurang baik, namun pelayanan kesehatan masyarakat sudah berjalan dengan baik, dan sumber-sumber pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah baik untuk kemajuan pembangunan desa.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Kinerja

Kinerja berasal dari kata *Job performance* yaitu prestasi kerja yang dicapai seseorang. Performance diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja, penampilan kerja. Sedangkan menurut Anwar Prabu (2004 ; 67) pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik bersifat variatif artinya terdapat berbagai indikator sesuai dengan fokus dan konteks penelitian. Karakteristik *Good Governance* dapat pula dijadikan indikator pengukuran kinerja yang meliputi *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, dan strategic vision*. (UNDP 1997, dalam Sedarmayanti, 2012: 5). Bila dikaji dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik, kelihatannya sederhana sekali ukuran kinerja organisasi publik, namun tidaklah demikian kenyataannya, karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan tentang ukuran kinerja organisasi publik.

2.2.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPRI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa). Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan , penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya (PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa).

Dengan batasan definisi tersebut yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah terdiri dari dua institusi, yakni institusi Pemerintah Desa atau dalam Ilmu Politik disebut Lembaga Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa yang dikenal sebagai Lembaga Legislatif. Lembaga eksekutif desa bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pembangunan di desa dan lembaga legislatif desa bertanggungjawab terhadap proses penyusunan aturan-aturan desa (legislasi/regulasi) dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif desa.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis desain penelitian ini adalah *analitik explanatory* dengan metode survei melalui wawancara. Penelitian analitis, menurut Nazir (2014:75) ditujukan untuk menguji hipotesis dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan. Penelitian analisis dengan desain survey yaitu untuk mengikuti pola perobaan dengan control statistic ataupun dengan analisis korelasi atau regresi dalam menentukan tingkat hubungan yang terjadi.

3.2 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif. Nazir (1999:63) memberikan definisi, yaitu: “Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Oleh karena itu penekanan latar belakang struktur dan individu secara utuh yang secara deskriptif menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya untuk menemukan masalah tertentu secara cermat, serta dengan metode deskriptif yang berusaha memahami masalah berdasarkan fakta dilapangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Menurut Moleong (2011:6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

3.4 Populasi dan Sampel

Dalam metode penelitian kata populasi amat populer, digunakan untuk menyebutkan sarumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, nilai, peristiwa, sikap, hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian (Burhan, 2005). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa di Desa Bligo.

Sampel terdiri dari bagian yang dapat dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2008). Dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling yaitu dengan wawancara tidak terstruktur, observasi terstruktur dan dokumentasi terhadap responden dari aparatur Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

3.5 Teknik Sampling

Desain sampling terbagi atas dua, yaitu *unrestricted random sample* (sampel tanpa batasan) dan *restricted random sample* (sampel dengan batasan-batasan). Penelitian ini menggunakan *unrestricted random sample* karena sampel ditarik secara langsung dari populasi. Populasi tidak dibagi-bagi lebih dahulu atas subsample. Teknik sampling pada penelitian ini yaitu menggunakan simple random sample, yang mana menurut Nazir (2014: 245) adalah tiap unit populasi diberi nomor. Kemudian sampel yang diinginkan ditarik secara random, baik dengan menggunakan random numbers ataupun dengan undian biasa.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Selanjutnya dijelaskan oleh Nazir (2014:153) bahwa teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi. Dimana peneliti akan menggabungkan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu: wawancara tidak terstruktur, observasi terstruktur dan dokumentasi.

3.7 Teknik Penganalisisan Data

Menurut F. N. Kerlinger yang dikutip dalam Nazir (2014:315) analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif,

3.8 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel merupakan konsep yang memiliki nilai. Variabel dalam ilmu sosial sifatnya abstrak dan sulit diukur secara realita, karena variabel dalam ilmu sosial berasal dari konsep yang perlu diperjelas dan diubah bentuknya sehingga dapat diukur dan dipergunakan secara operasional. Variabel dependen dan variabel bebas merupakan variabel yang mana variabel Y merupakan sebab dari variabel X, dan variabel X merupakan variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel X yaitu kinerja aparatur desa di Desa Bligo, sedangkan variabel Y penyelenggaraan pemerintahan Desa Bligo .

REFERENSI

- Agustin, M. 2015. *Kinerja Aparatur Desa dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*.
- Arenawati, 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Fatnuriawan, A. 2014. *Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Upaya meningkatkan Mutu Pelayanan Publik di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun 2014*.
- Indrawati, W., Dr. Irawan Suntoro, M.S., Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. 2017. *Efektivitas Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Desa Tanggulangin*.
- Jaitun. 2013. *Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung*. ISSN 0000-0000.
- Lingawe, O.N., Patar Rumampea, Salmin Dengo. 2011. *Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Kampung Kiliarma Distrik Agimuga Kabupaten Mimika Propinsi Papua*.
- Moleong, Lexy. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir, M, Ph.D. (2014). *Metode Penelitian*. Cet 10. Ghalia Indonesia 2014. ISBN:978-979-450-173-5
- Nor, M. 2014. *Kinerja Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Desa dan Pelayanan Masyarakat di Kampung Long Iram Seberang Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat*. ISSN 2337-8670.
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian*. Jakarta. Pustaka Belajar.
- Paramitha, L. M., Tjahjanulin Domai, Suwondo. 2013. *Kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam Rangka Otonomi Desa (Studi di Desa Gulun, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan)*.

PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prabu, Anwar. 2014. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama

PPRI No. 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*

Saputra, H. A. 2016. *Kinerja Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Teras Baru Kecamatan Tajung Palas Kabupaten Bulungan*. ISSN: 2337-8670.

Sedarmayanti. 2012. *Good governance “kepemerintahan yang baik”* Bandung: x Maju Mundur

Siwu, A. L. 2015. *Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Desa Motoling 1 Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wuri, R.R, Markus Kaunang, Novie Revlie Pioh. 2016. *Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)*.